



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEUKU TAHLIL
2. Jabatan : DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
3. NHK : 682034

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.102.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 312 m2/168 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.500.000

1. MOBIL, FORD ECOSPORT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SATRIA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 194.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 384.499.852

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.800.499.852

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.800.499.852

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.